



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IBNU HARRIS AL HUSSAIN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 404024

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.160.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/90 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 1846 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 2290 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 49.000.000

1. MOBIL, ISUZU MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA GL PRO Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA GL PRO Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.261.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	205.112.000
Sub Total	Rp.	1.434.373.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.434.373.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.